

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

29 Agustus 2022

NTB

BPK Audit Belanja Modal Pemprov NTB Tahun 2021 dan 2022

Editor: Redaksi 5  29 Agustus 2022



Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim (Didit/Lombok Post)

MATARAM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB turun melakukan audit terhadap belanja modal Pemprov NTB tahun 2021 dan 2022. "Ini permintaan dari BPK langsung," kata Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim.

Ibnu menyebut pemerintah dari BPK merupakan sesuatu yang wajar. Sebagai bagian dari langkah preventif untuk mencegah penyimpangan anggaran. "Bagian pencegahan dari kami. Kalau pemeriksaan BPK kan rutin setiap tahun melakukan itu," ujarnya.

Ada tiga model pemeriksaan yang rutin dilakukan BPK. Seperti pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah; pemeriksaan kinerja; serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pemeriksaan pendahuluan terhadap belanja daerah tahun anggaran 2021 dan 2022 Pemprov NTB masuk pada kategori PDTT. Yang akan dilakukan selama satu bulan ke depan.

Kata Ibnu, salah satu item pemeriksaan BPK terkait dengan anggaran peningkatan jalan provinsi serta pembangunan gedung IGD RSUD NTB. Kedua proyek tersebut digarap dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). "Iya soal jalan dan rumah sakit," katanya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, temuan dari hasil pemeriksaan BPK akan menjadi feedback bagi pemprov NTB. "Ketika ada yang salah, kami bisa memperbaiki dengan baik," kata Zul.

Terkait dengan PDTT terhadap belanja modal, BPK telah meminta Gubernur NTB untuk turut membantu. Salah satunya terkait dengan pemberian data-data yang dibutuhkan untuk menunjang pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK saat ini bersifat tematik. Untuk pencegahan korupsi. Seperti yang juga dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemeriksaannya juga terkait dengan belanja tahun 2021 dan 2022, khususnya belanja yang dibiayai (untuk pejabat," ungkap gubernur.

Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana mengatakan, pemeriksaan sistem pencegahan korupsi dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan pencegahan korupsi. "Terkait dengan pengadaan barang jasa. Bagaimana mekanisme e-payment dan e-catalog, sampai sejauh mana itu berjalan," kata Ade terkait dengan pemeriksaan BPK.

(dit/r5)